

Daftar Pustaka

Buku

- Afiyah, S., Irawati, I., Nurdin, M., Zainal, H., & Islah, K. (2024). *Buku Ajar Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Djani, W. (2022). *Administrasi Publik: Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital*. Jakarta: Penerbit Andalas.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Satibi, I. (2012). *Manajemen Publik dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya.
- Syarifudin, Z., & Tangkilisan, H. (2008). *Kinerja Organisasi: Manajemen Publik Untuk Menciptakan Kota Bersih & Nyaman Dihuni*. Yogyakarta: YPAPI.
- Wijaya, F. A., & Danar, R. O. (2014). *Manajemen Publik: Teori dan Praktik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Artikel Jurnal

- AL Riyanto, & Herawati, N. R. (2021). Analisis kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menekan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang tahun 2020. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 123–135.
- Beladina. (2019). Implementasi program perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. *Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak*, 3(1), 45–60.

- Larasati, V. P. (2023). Mismanagement dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.
- Lathiva. (2020). Analisis kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menekan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(3), 78–90.
- Pakpahan, B. S. I. (2023). Analisis kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan.
- Permatasari, I. (2013). Analisis kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Publik*.
- Prastita, V. D. (2023). Mismanagement dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(1), 112–125.
- Satriani, & Harsasto, P. (2019). Implementasi program perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*
- Septya, A. D. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Shabrina, N. N. (2024). Analisis kinerja Perumda Air Minum Tirta Ranga dalam pelayanan air bersih Kabupaten Subang.
- Tiastanti, H. (2022). Analisis kinerja organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Administasi Publik*

Peraturan dan Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Daerah Kota Semarang. (2016). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Walikota Semarang. (2021). Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Sumber Resmi

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. (2021–2023). Data penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.

Bappeda Kota Semarang. (2020). Letak geografis Kota Semarang.

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. (2021). Luas dan batas wilayah administrasi Kota Semarang.

DP3A Kota Semarang. (2024). Laporan tahunan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Diakses dari <https://dp3a.semarangkota.go.id>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). Data korban kekerasan perempuan di Jawa Tengah. Diakses dari <https://kemenpppa.go>.